

**Studi Empiris Tingkat Perkembangan Kemampuan
Keuangan Desa
(Studi Kasus pada kantor Desa Gambiran Kecamatan Kalisat
Kabupaten Jember)**

Meri Silvia Dewi, Akhmad Suharto, Ahmad Hasan Hafizi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

merysilviadewi@gmail.com

ABSTRAK

Menurut undang-undang no.6 tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan desa Gambiran yang mana desa Gambiran ini memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan yang diterima dari pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan alat ukur derajat desentralisasi fiskal untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan desa. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kemampuan keuangan desa Gambiran masih tergolong kurang mampu membiayai rumah tangganya sendiri, karena besar pendapatan asli desanya jauh di bawah total penerimaan daerah. Dimana seharusnya antara total penerimaan daerah dengan pendapatan asli desa harus lebih besar pendapatan asli desa sehingga dapat disebut desa yang mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Kata Kunci: Desa, PAD, TDP, Derajat Desentralisasi Fiskal

ABSTRACT

According to Law No. 6 of 2014, villages are traditional villages and villages or what are called by other names, hereinafter referred to as villages, are legal community units that have wide territorial boundaries to regulate and manage government affairs, interests of local communities based on community initiatives, traditional origin, and / or rights recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia.

This study aims to determine the financial capabilities of Gambiran village where Gambiran village has original village income and income received from the government. This research method uses quantitative methods and uses fiscal decentralization measurement tools to determine the level of village financial capability.

The conclusion of this study is that the financial capacity of Gambiran village is still relatively inadequate to finance its own household, because the size of the original income of the village is far from the total regional income. Where should the total regional income with the original village income be greater than the village's original income so that it can be called a village that is able to finance its own household.

Keywords: Village, PAD, TDP, Degree of Fiscal Decentralization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam pelaksanaan Otonomi Daerah terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Ke empat elemen tersebut menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Anita Wulandari, 2001:17), adalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Fiskal, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Ekonomi. Keempat elemen tersebut menjadi kewajiban daerah untuk mengelola secara efisien dan efektif. Sehingga dengan demikian akan terjadikemampuan / kemandirian suatu daerah untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yang merupakan komponen utama dari desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya / segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah harus berupaya terus menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diadakan pengukuran dan penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan dalam

mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan, peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan sumber pajak atau retribusi daerah (Rinaldi Syahputra, 2018).

Salah satu lembaga pemerintahan terkecil yang mendapatkan bantuan dan subsidi dari pemerintah ialah desa. Desa merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan baik itu dari tingkat daerah maupun pusat. Melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Desa pasal 1 angka 1 No. 6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa : desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normative. Dengan adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri 37/2007) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP 72/2005) seharusnya desa mampu membangun desa menjadi lebih maju dengan cara mengelola keuangan desa dengan baik. Pembangunan desa yang terus dijalankan demi memakmurkan rakyatnya. Desa Gambiran yang memiliki sumber pendapatan dana dari BUMDes membuat pendapatan asli desa di Desa Gambiran meningkat disbanding tahun sebelumnya memiliki harapan untuk dapat menaikkan tingkat perkembangan kemampuan keuangan desanya. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengukur apakah keuangan desa tersebut dapat dikatakan baik dalam hal pembangunan desa dengan system pengelolaan keuangan yang telah diterapkan seperti sekarang. Berikut adalah data pendapatan Desa Gambiran pada tahun 2017 hingga 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang diatas ialah bagaimana tingkat kemampuan keuangan desa gambiran tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Desa Gambiran Kecamatan Kalisat.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai masukan oleh berbagai pihak yang membutuhkannya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Objek Yang Diteliti

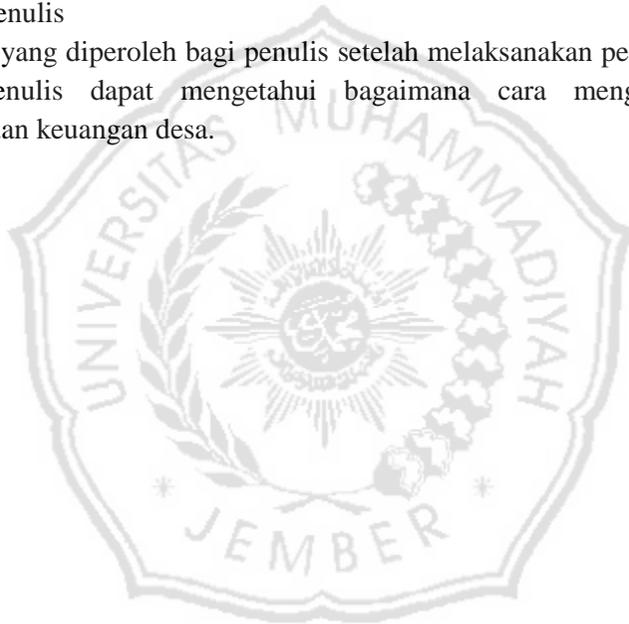
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintahan desa khususnya dalam mengukur kemampuan keuangan Desa Gambiran.

2. Bagi Pihak Universitas

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

3. Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh bagi penulis setelah melaksanakan penelitian tersebut yakni penulis dapat mengetahui bagaimana cara mengetahui tingkat kemampuan keuangan desa.



III. METODE PENELITIAN

3.4.1 Jenis Data

Jenis data terdapat dua macam, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi, laporan keuangan atau jurnal. Dan jenis data yang digunakan oleh peneliti disini ialah jenis data sekunder, karena merupakan sebuah laporan pendapatan asli desa.

3.4.2 Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel time series dimana data time series adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu (misalnya : hari, minggu, bulan, tahun). Dan data yang digunakan peneliti adalah data laporan keuangan desa Gambiran tahun 2016 hingga 2018.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Dalam penelitian ini dilakukan sistem wawancara dan observasi langsung pada objek yang sudah ditentukan yakni Kantor Desa Gambiran. Guna untuk menyelesaikan penelitian data-data yang dibutuhkanpun harus diperoleh untuk diolah dengan menggunakan alat uji statistik yang telah ditentukan. Data-data yang dibutuhkan ialah laporan pendapatan asli desa tahun 2016 hingga 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Astuti dkk tahun 2014 yang meneliti perbandingan kemampuan keuangan daerah di provinsi Sulawesi Utara yang mengatakan bahwa kemampuan keuangan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal, dimana derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi fiskal khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD, menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval (Anita W : 2003). Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Astuti dkk yakni kota Manado dan kota Belitung tergolong daerah yang kurang mampu membiayai rumah tangganya sendiri karena PADnya tidak lebih tinggi dari TDPnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Begitu juga dengan desa, sebuah desa dapat dikatakan mampu membiayai rumah tangganya sendiri apabila pendapatan asli desanya tinggi, dan jika dihitung menggunakan derajat desentralisasi fiskal dimana derajat desentralisasi fiskal ini adalah merupakan alat analisis untuk melihat kemampuan desa dalam menjalankan otonomi desa.

Derajat desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD, semakin kuat pula derajat desentralisasi fiskalnya (tingkat kemandirian daerahnya), begitu pula sebaliknya.

Dalam studi kasus yang diangkat oleh peneliti disini mengambil objek di desa Gambira Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, dimana peneliti meneliti tingkat kemampuan keuangan desa Gambiran dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Dari hasil perhitungan diatas, Desa Gambiran tergolong masih bergantung pada anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, dikarenakan pendapatan asli

desanya tingak setinggi bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu desa Gambiran masih tergolong desa yang kurang mampu untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk instansi desa adalah sebagai berikut :

1. Desa Gambiran perlu memaksimalkan kinerja BUMDes yang ada sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih banyak untuk membantu meningkatkan pendapatan asli desa.
2. Desa Gambiran sebaiknya mendirikan lagi usaha-usaha milik desa lainnya untuk membantu meningkatkan pendapatan asli desa.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Oesi(2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang. Jurnal Ekonomi. Malang.

Anonim, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (2013). Profil Daerah Tahun 2012-2013. Bulungan: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Azhar, MHD Karya Satya(2008). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. TESIS (dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara. Medan.

Benny ferdianto(2016).eksistensi bandan usaha milik desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa di desa tiyuh candra kencana kecamatan tulang bawang tengah kabupaten tulang bawang barat. Bandar lampung

Departemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembangunan (PKDSP) buku panduan dan pendirian dan pengelolaan BUMDes. Fakultas ekonomi universitas brawijaya.2007

Dr. Riduwan M.B.A, Adun Rusyana M. Pd, Enas M.M.2013.*Cara mudah belajar SPSS17.0 dan aplikasi statistic penelitian*.Bandung.ALFABETA CV.

Evelin Balandu.(2014), “Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php> (diakses 12 november 2018)

Fidelius. 2013. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA, Volume I, No.4, 2088-2096.

Hestanto.(2018), “pengertian pendapatan asli daerah menurut para cendekiawan.” <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/> (diakses 12 november 2018)

Hestanto (2016). Pengertian pendapatan. <http://www.hestanto.web.id> (diakses 19 Desember 2018)

Huda, Ni'matul.2012.*Hukum Pemerintah Dearah*.Bandung: Nusa Media

Kasmir, 2009. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Naskah akademik RUU Desa.direktorat pemerintahan desa dan kelurahan direktorat jendral pemberdayaan masyarakat dan desa. Departemen dalam negeri 2007

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014

Perda tentang keuangan desa pasal 1 nomor 18 tahun 2014

Rozaki, Abdur.2005.*prakarsa desa dan otonomi desa*.yogyakarta.IRE Press

Rudi.2013.*humuk pemerintah desa*.PKKPU.Bandar Lampung

Saragih, Juli Panglima(2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 huruf a

Undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang desa pasal 71 ayat (1)

Undang-undang nomor 6 pasal 72 ayat (1) huruf a tahun 2014

